

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Tulungagung dan Dinas Sosial

1. Profil Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak 154 km dari barat daya ibu kota Provinsi Jawa Timur yakni Kota Surabaya. Kabupaten Tulungagung sendiri dikenal sebagai daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tulungagung.

Penamaan Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki dua versi penamaan. Versi pertama adalah nama “Tulungagung” berasal dari kata “Pitulungan Agung” (pertolongan yang agung). Nama ini berasal karena adanya seorang pemuda bernama Joko Baru yang berasal dari Gunung Wilis yang mengeringkan sumber air di Ngrowo (Kabupaten Tulungagung tempo dulu) dengan cara menyumbat sumber air menggunakan lidi dari pohon enau atau pohon aren.

Versi kedua penamaan Kabupaten Tulungagung sendiri adalah Kabupaten Tulungagung berasal dari dua kata, yakni tulung dan agung. Tulung yang mempunyai arti sumber yang besar dan agung berarti besar. Sehingga, dalam pengertian berbahasa Jawa, Tulungagung berarti daerah yang memiliki sumber air yang besar. Hal ini dikarenakan, sebelum adanya Bendungan Niyama yang dibangun di Tulungagung selatan oleh

pendudukan tentara Jepang, di penjuru daerah Tulungagung hanya ada sumber air saja. Karena terlalu banyaknya air itulah Tulungagung seringkali tergenang air, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan.⁷²

Dugaan terkuat mengenai penamaan Kabupaten Tulungagung adalah versi kedua. Penamaan Tulungagung sendiri dimulai ketika ibu kota Kabupaten Tulungagung mulai dipindah di tempat sekarang ini (Kecamatan Tulungagung). Sebelumnya, ibu kota Kabupaten Tulungagung berada di daerah Kalangbret dan diberi nama Kadipaten Ngrowo (berarti sumber air). Perpindahan tempat ibu kota ini terjadi sekitar 1901 Masehi.⁷³

Hari jadi Kabupaten Tulungagung sendiri diperingati sejak tahun 2003. Hal ini dikarenakan pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala “Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa” yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M.

⁷² Arvin Rizki Julian, *Keindahan Rupa Stasiun Tulungagung dan Sejarahnya*, (t.t.: Guepedia, 2016), hal. 15-16.

⁷³ *Ibid.*, hal. 16.

Tanggal keluarnya prasasti inilah yang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung.⁷⁴

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat (111°433'-112°07') Bujur Timur dan (7°51'-8°08') Lintang Selatan. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek di sebelah Barat, Kabupaten Blitar di sebelah Timur, Kabupaten Kediri di sebelah utara, dan Samudra Hindia di sebelah selatan.⁷⁵

Secara topografi, Kabupaten Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m diatas permukaan laut (dpl). Bagian Barat Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan bagian Pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang sekaligus terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas yang seolah membagi Kabupaten Tulungagung menjadi dua bagian yakni utara dan Selatan (disebut Kali Parit Raya rangkaian dari Kali Parit Agung). Bagian selatan Kabupaten Tulungagung sendiri merupakan daerah pegunungan bagian dari Pegunungan Kidul. Sedangkan bagian barat laut Kabupaten Tulungagung tepatnya di Kecamatan Sendang terdapat Gunung

⁷⁴ Suara Republik News, “Sejarah Kabupaten Tulungagung”, dalam <https://suararepublik.news/sejarah-kabupaten-tulungagung/>, diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 21.05 WIB.

⁷⁵ Januariani, *Tulungagung....*, hal. 1.

Wilis yang berfungsi sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung dengan ketinggian 2552 m.⁷⁶

Kabupaten Tulungagung sendiri mempunyai 19 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Pakel, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Sendang, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Nagntru, Kecamatan Ngunut, dan Kecamatan Pagerwojo. Dari 19 kecamatan tersebut terdiri dari 257 desa dan 14 kelurahan. Sedangkan jumlah penduduk di Tulungagung adalah 1.089.780 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung beserta laju pertumbuhannya.

⁷⁶ Julian, *Keindahan....*, hal. 18-19.

Tabel 4.1. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung, 2020

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
Besuki	38.10	1.14	3.50	463.70	99.80
Bandung	47.76	1.20	4.38	1 138.25	98.94
Pakel	53.17	1.02	4.88	1 474.49	98.85
Campurdarat	57.43	0.64	5.27	1 451.77	1 02.05
Tanggunggunung	25.79	0.97	2.37	219.08	1 00.12
Kalidawir	74.31	1.53	6.82	759.73	99.59
Pucanglaban	25.81	1.61	2.37	311.21	1 00.11
Rejotangan	80.44	1.32	7.38	1 209.81	1 00.80
Ngunut	82.61	0.95	7.58	2 191.35	1 00.76
Sumbergempol	71.16	1.07	6.53	1 811.71	1 00.97
Boyolangu	83.28	0.83	7.64	2 166.52	1 01.02
Tulungagung	65.95	0.12	6.05	4 824.58	97.52
Kedungwaru	94.43	0.98	8.67	3 175.18	1 00.07
Ngantru	57.33	0.9	5.26	1 548.26	1 00.48
Karangrejo	43.44	1.04	3.99	1 222.26	99.31
Kauman	51.78	0.52	4.75	1 678.86	1 00.49
Gondang	58.67	0.81	5.38	1 332.83	99.68
Pagerwojo	31.40	0.44	2.88	355.88	1 00.97

Sendang	46.91	0.79	4.30	486.27	1 00.43
Kabupaten Tulungagung	1 089.78	0.93	100	1 032.33	100.13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung.⁷⁷

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, dalam <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2021/04/19/5185/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-per-tahun-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-di-kabupaten-tulungagung-2020.html>, diakses pada tanggal 25 April 2021 pukul 06.21 WIB.

2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.⁷⁸ Dinas Sosial sendiri bertugas membantu tugas Bupati Tulungagung dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.⁷⁹ Dinas Sosial sendiri selaku yang menaungi masalah sosial, hendaknya mampu berperan maksimal guna mewujudkan pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga, mereka tidak lagi dianggap sebagai beban dari keluarga, selain itu juga dapat mengurangi tingkat pengangguran, tingkat pengemis di Kabupaten Tulungagung, serta dapat meningkatkan rasa mandiri bagi para penyandang disabilitas.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁸⁰

⁷⁸ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (4).

Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
 - 2) Seksi Asistensi dan Jaminan Sosial;
 - 3) Seksi Bantuan dan Advokasi Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Lanjut Usia dan Anak.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - 2) Seksi Pemberdayaan PMKS Rentan;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.⁸¹

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 3.

B. Paparan Data

1. Gambaran Umum Penyandang Disabilitas dan Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Masyarakat Kabupaten Tulungagung

a. Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung

Penyakit polio merupakan mayoritas penyakit yang dapat menjadikan seseorang mengalami kedisabilitasan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Didik Prayitno.

“Menurut data yang saya lihat. Mayoritas penyandang disabilitas yang ada di Tulungagung mengalami kecacatan karena penyakit Polio. Seperti saya ini contohnya, saya menderita penyakit polio saat saya masih kecil. Penyakit itu menyebabkan salah satu kaki saya tidak tumbuh secara normal. Tetapi ya tetap saya syukuri apa yang telah diberikan terhadap saya. Mayoritas penyandang disabilitas di Tulungagung yang disebabkan oleh penyakit polio rata-rata kaki dan tangannya yang tidak tumbuh dengan normal. Rata-rata mereka alama dari kecil seperti saya. Tetapi ada juga karena faktor lain seperti stroke. Seperti juga tangan dan kakinya diamputasi karena kecelakaan, ada juga yang memang jari-jari tangannya tidak tumbuh sempurna sejak kecil.”⁸²

Kondisi demikian juga dialami oleh Ibu Nanik Riyanto. Beliau merupakan salah satu anggota PERCATU yang mengidap polio, sehingga menyebabkan kedisabilitasan pada beliau. Berikut penuturan beliau.

“Saya jadi penyandang disabilitas sudah sejak kecil, Mbak. Waktu itu badan saya panas, tapi ternyata itu penyakit polio. Karena sakit itu, menyebabkan jari tangan saya tumbuh tidak sempurna.”⁸³

⁸² *Ibid.*

⁸³ Wawancara dengan Ibu Nanik Riyanto, pada 26 April 2021.

Selain penyakit polio sebagai penyebab seseorang mengalami kedisabilitas, terdapat faktor penyebab lainnya. Salah satunya penyebabnya yakni seseorang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan orang tersebut mengalami kedisabilitas. Berikut penuturan bapak Syafi'i selaku pendamping penyandang disabilitas (PPD) Kabupaten Tulungagung.

“Ada juga yang karena kecelakaan. Ada yang namanya Ali, itu dia mengalami netra pas SMA karena kecelakaan.”⁸⁴

Penyebab kedisabilitas seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yakni dapat disebabkan karena keturunan, kecelakaan, atau karena virus polio sekalipun. Oleh karena itu, tidak heran seorang penyandang disabilitas kerap kali terhambat dalam menjalankan aktifitas mereka di lingkungan masyarakat. Namun, dengan keterbatasan itu bukanlah menjadi penyebab mereka untuk tidak dapat berdaya. Dengan dukungan dari lingkungan, seorang penyandang disabilitas sekalipun dapat bermanfaat bagi orang lain dan berdaya bagi diri mereka sendiri.

b. Organisasi PERCATU Kabupaten Tulungagung

PERCATU yakni kepanjangan dari persatuan cacat tubuh. Organisasi ini didirikan pada tahun 2001. Organisasi ini sendiri dipelopori oleh Bapak Didik Prayitno Kulmanandi yangmana beliau telah berhasil mengumpulkan teman-teman beliau sesama penyandang

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Syafi'i selaku Pendamping Penyandang Disabilitas (PPD) Kabupaten Tulungagung, pada 26 April 2021.

disabilitas. Pada saat pertermuan pertama itulah dihadiri oleh 25 orang dan mereka sepakat menamai organisasi tersebut dengan PERCATU. Organisasi ini sendiri mempunyai motto “dibalik segala kekurangan tersimpan suatu kelebihan”. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan mewujudkan partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan terhadap para penyandang disabilitas dalam segala aspek, meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas, dan untuk memperjuangkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas, serta untuk membina keakraban, kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama penyandang disabilitas. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Bapak Didik Prayitno, selaku ketua PERCATU.

“PERCATU ini sebenarnya didirikan dengan tujuan untuk mempererat hubungan sesama, mengangkat citra penyandang disabilitas, agar penyandang disabilitas memiliki rasa percaya diri dan memberikan keyakinan pada masyarakat tentang kemampuan kerjanya, mempermudah mencari jalan keluar masalah yang dihadapi dengan musyawarah bersama, peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya penyandang disabilitas, pembimbing dan pengarahan bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, pengembangan kemitraan dengan lembaga pemerintah, dunia, swasta, dan masyarakat.”⁸⁵

PERCATU adalah organisasi yang legal dan sah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dalam lingkup Kabupaten Tulungagung sejak 22 April 2016. PERCATU sendiri diketuai oleh Bapak Didik Prayitno Kulmanandi, sekretaris oleh Tien Budi Sunarsih, sedangkan bendahara oleh Bapak Komarudin.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Didik Prayitno Kulmanandi selaku Ketua PERCATU Kabupaten Tulungagung, pada 25 April 2021.

c. Akses Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas di Masyarakat Kabupaten Tulungagung

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas menjadikan mereka kurang percaya diri dalam menjalankan kehidupan sosial di masyarakat. Tidak jarang masyarakat masih memandang iba dan remeh para penyandang disabilitas. Sehingga, stigma negatifpun yang kerap kali ditanggung oleh para penyandang disabilitas. Hal inilah yang mampu menghambat mereka dalam meraih kemandirian. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Syafi'i.

“Gini mbk, masyarakat di Tulungagung itu unik sih, memandang disabilitas itu tidak mampu. Ketika orang bilang nggak mampu, bahkan di daerah lain itu, seperti Trenggalek responnya ke mereka (tuna netra) itu sudah bagus. Satu karena si dia juga sudah lama disana, kan karena sekolahnya di sana, padahal dia orang Tulungagung. selain itu masyarakat disana (Trenggalek) itu juga sudah biasa sama mereka (tuna netra). Dia (tuna netra) itu mandiri mbk, numpak bis dhewe, kemana-mana dhewe. Bahkan mereka (tuna netra) itu sering lo di Tulungagung, takon wae nggak disauri mbk, nanti misal naik bis dikiro nggak bayar lah, dan sebagainya lah. Jadi aku tu pengen dobrak yang begitu mbk. Ya mulai dari situ aja sih mbk. Jadi mereka itu jangan dikasihani, tapi didukung gitu.”⁸⁶

Berbeda dengan pernyataan Bapak Syafi'i, Bapak Ali yang merupakan salah satu warga di Kabupaten Tulungagung menyampaikan bahwasanya beliau kurang begitu percaya akan kemampuan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas.

“Kalau orang-orang gitu ya gimana ya mbk. Anggapannya ya kasihan, tapi ya bisanya apa juga. Mau minta tolong apa gitu, juga bingung mbk, nanti takutnya mereka nggak mampu.”⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Ali, pada 4 Mei 2021.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Emmy. Berikut penuturan beliau.

“Sebenere bukan meremehkan mbk. Ya kasihan itu sih. mau minta tolong apa gitu misalnya, itu juga takut mbk, nanti takut ndak bisa gitu. Jadi ya udah jadi nggak berani kayak minta tolong apa gitu.”⁸⁸

Selain di lingkungan masyarakat, stigma negatif yang ditujukan kepada para penyandang disabilitas juga kerap kali bermunculan dari dunia kerja. Atas dasar itulah, organisasi PERCATU didirikan. Diantara alasan berdirinya organisasi tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Banyak dijumpai masalah yang selalu dikeluhkan penyandang disabilitas tentang keberadaanya di lingkungan masyarakat dalam:
 - a) Kemampuan kerja yang kurang bisa diterima di masyarakat umum.
 - b) Keterbatasan lapangan kerja yang bisa dilakukan penyandang disabilitas.
 - c) Tentang hak asasi penyandang disabilitas yang sering diabaikan.
- 2) Tidak adanya perhatian dari masyarakat disekitar yang sehubungan dengan sosialisasi dan interaksi dengan lingkungan.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Emmy, pada 4 Mei 2021.

- 3) Banyak dijumpai disekitar kita dan yang ditangani hanyalah panti-panti asuhan yatim piatu.”⁸⁹

Kepercayaan diri para penyandang disabilitas dapat timbul karena adanya dukungan sosial dari lingkungan mereka. Hal inilah sesuai dengan yang diutarakan oleh Bapak Syafi'i.

“Contohnya ada yang namanya Toni rejosari. Awalnya tak temui itu meneng ae mbk. Kalau keluarga sih support mbk, tapi pas diluar itu dia itu merasa dia sendiri yang mengalami itu mbk. Habis itu saya inisiatif untuk memanggil teman dari bago, yang namanya pujo. Pujo itu dulu juga gitu mbk. Dulu itu dia kebledosan gasnya mayangkara, sudah pakai pengaman, tapi kacanya masuk mata. Satu tahun dua tahun dia nangis aja mbk. Nah akhirnya si pujo ini kan bisa hp, lalu tak ajak ke rumahnya toni ini ya mbk, buat ngasih supportlah. Kan ya sesama ngalami gitu ya mbk, jadi lebih bisa ngerti. Kalau saya yang ngasih support itu ya sepertinya kurang berasa gitu mbk. Nah semenjak itu di toni ini tak ajak pertemuan-pertemuan. Dan akhirnya tahun 2020 kemarin tak ajak ke bali mbk buat ikut pelatihan. Ke bali itu pun orang tuanya hampir nolak mbk, karena takutnya anaknya nggak mampu kan. Nah, perubahan drastis ya mbk, sepulang dari bali. Dia makin pede. Dulu si toni ini kan belum bisa main hp ya mbk. Nah tak genjot dia biar bisa main hp, setidaknya dua minggu sebelum ke bali itu harus sudah bisa hp, soalnya itu kan satu satunya alat komunikasi ya mbk. Nah karena dia semangatnya tinggi, jadi bisa hp mbk.”⁹⁰

Dengan menghilangkan stigma negatif bagi para penyandang disabilitas, membuat mereka semakin nyaman dan merasa bahwa mereka juga bagian dari masyarakat. Hal ini lah yang perlu dihimbau kepada masyarakat, bahwasanya stigma negatif terhadap para penyandang disabilitas, membuat mereka sulit untuk berdaya. Oleh karena itu, adanya sosialisasi terkait hal tersebut dirasa perlu guna

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Didik Prayitno, pada 25 April 2021.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Syafi'i pada 26 April 2021.

membuat masyarakat sadar bahwasanya para penyandang disabilitas juga individu yang mampu berdaya terlepas dari stigma negatif yang melekat pada mereka. Namun, sosialisasi terkait hal tersebut belum terlaksana di wilayah pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Setiaji.

“Sosialisasi kepada masyarakat. Secara khusus kita ndak ada kegiatan semacam itu, ya hanya himbauan semacam itu, bukan khusus, pas ada apa gitu. Sifatnya ya nggak khusus, hanya semacam informasi gitu aja. Tapi dalam beberapa kegiatan/kesempatan diharapkan masyarakat dan dunia usaha dapat melibatkan penyandang disabilitas agar berperan aktif dalam berbagai kegiatan.”⁹¹

Selain Bapak Setiaji, terkait sosialisasi ini, Bapak Syafii juga menyampaikan bahwasaya di Kabupaten Tulungagung sendiri juga belum pernah diadakan sosialisasi terkait pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Berikut penuturan beliau.

“Kalau sosialisasi secara khusus di masyarakat tentang disabilitas itu belum ada. Ya aku cuma inisiatif ngajak mereka ke tongkrongan gitu mbk. Ya *step by step* sih mbk biar nanti lama-lama masyarakat juga tahu mereka gitu.”⁹²

Stigma negatif yang melekat pada para penyandang disabilitas bukanlah hal yang lumrah. Namun hal tersebut perlu adanya pembaharuan. Oleh karenanya, menciptakan individu yang mandiri pada diri para penyandang disabilitas sangat diperlukan guna mewujudkan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dalam masyarakat. Dalam hal ini Bapak Didik menyampaikan bahwasanya

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Setiaji, pada 29 April 2021.

⁹² Wawancara dengan Bapak Syafi'i, pada 26 April 2021.

guna mengubah stigmatisasi di masyarakat, organisasi PERCATU memiliki program jangka panjang dan jangka pendek yaitu:

- 1) Program jangka panjang meliputi:
 - a) Mengembangkan badan usaha yakni koperasi.
 - b) Mengadakan pembinaan kewirausahaan terhadap anggota PERCATU.
 - c) Mengembangkan jaringan kerja dengan badan atau lembaga pemerintahan dan swasta.
 - d) Menciptakan bisnis online.
- 2) Program jangka pendek meliputi:
 - a) Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang PERCATU.
 - b) Bekerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah dalam bidang pelatihan keterampilan.
 - c) Mengajukan permohonan kepada pemerintah perihal pendataan dalam bidang pelatihan keterampilan.
 - d) Pertemuan rutin anggota dalam satu tahun 6 kali dan pertemuan pengurus satu tahun 4 kali.
 - e) Mengajukan permohonan dana terhadap pemerintah dan pemberdayaan PERCATU.⁹³

Selain berpartisipasi aktif dalam organisasi penyandang disabilitas, guna mewujudkan pemberdayaan sosial di tengah-tengah

⁹³ Wawancara dengan Bapak Didik Prayitno, pada 25 April 2021.

masyarakat, para penyandang disabilitas juga berusaha berdaya dengan cara mengikuti program pelatihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. adanya program pelatihan ini membuat mereka dapat menghasilkan pendapatan sendiri. Hal inilah yang disampaikan oleh Ibu Suci selaku anggota PERCATU.

“Buat sampai seperti sekarang ini ya ada prosesnya mbk. Saya nggak pengen merepotkan orang lain gitu mbk. Pengen bener-bener apa apa bisa sendiri. Dulu kan saya ikut program panti di Surabaya mbk, jahit. Ini dulu itu ditawarkan sama desa, dibiayai sama dinas mbk. Ya saya ikut mbk. 10 bulan disana saya sudah dinyatakan mampu. Nah, habis itu dicarikan tempat magang mbk, di butik mbk. Ya memang butike itu khusus nerima yang penyandang disabilitas itu mbk. Nah habis dari butik, saya rasa sudah bisa, akhire saya pulang, nyari kerjaan disini (Tulungagung). Alhamdulillah ikut jahit di Bolo sana mbk. Sana pemiliknya juga nggak gimana-gimana sama saya, ya mungkin memang pas bener-bener butuh tenaga mbk. Setelah ikut itu, saya rasa sudah mampu, bisa motong dan berani, akhire saya buka jahit sendiri. Ya jahit-jahit bajulah, pesenan gitu-gitu.”⁹⁴

Beliau juga menambahkan, berkat usaha dan kegigihan beliau untuk mandiri, masyarakat menjadi beranggapan positif kepada beliau sebagai seorang penyandang disabilitas.

“Tanggapan masyarakat jadi positif, ya misale gini ya mampu, setidak e ndak (tidak) merepotkan yang lain. Semua kan bisa sendiri. Nggak memandang remeh, ya biasa aja.”⁹⁵

Selain Ibu Suci, Ibu Nanik dan Bapak Pri juga ikut merasakan dampak dari adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Berikut penuturan Ibu Nanik

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Suci Selaku Anggota PERCATU, pada 26 April 2021.

⁹⁵ *Ibid.*

“Sakderenge batik niki nggih dodol sak sak e mbk. Nggih nggenten niki mbk, dodolan baju, jajan-jajan, nggih rosok nggihan, nggih kadang jahit. Lekne enjing jam setengah 4 kan kula nyapu teng dinkes, terus mangke sampaha teng tong-tong niku kula pendheti. Batik niki sakniki dados usaha utamane kula mbk. Riyen nika kan disukani bantuan 2000 bibar pelatihan, terus kula damel tumbas kain, terus turahane kula damel tumbas dandang niku mbk.”⁹⁶

“Sebelum ngenal usaha batik ini, saya dulu itu ya jualan yang bisa dijual mbk, jualan baju, jajan-jajan, juga ngambil sampah mbk, ya kadang juga menjahit. Kalau pagi jam setengah 4 saya itu nyapu di Dinas Kesehatan mbk, terus nanti sampah-sampahnya yang di tong-tong itu saya ambil mbk. Batik ini sekarang jadi usaha utama saya mbk. Dulu itu, kan dapat bantuan dari pelatihan itu sebesar 2 juta, nah itu saya belikan kain, terus sisa uangnya saya belikan panci besar mbk.”

Kemudian Bapak Pri selaku peserta pelatihan fermentasi pakan ternak menuturkan bahwa dengan pelatihan ini, dirasa mampu meningkatkan kekebalan dan menjaga daya tahan tubuh hewan ternak. Berikut penurutan beliau.

“Fermentasi pakan niki niku Alhamdulillah saget meningkatkan kualitas e wedhus kula mbk. Mangan yo lahap, lemu-lemu, sehat-sehat, tur ya pakan e dadi suwi mbk. Awet mbk. Gek kotorane lek dingge pupuk ya apik mbk.”⁹⁷

“Fermentasi pakan ini Alhamdulillah bisa meningkatkan kualitas kambing saya mbk. Makannya jadi lahap, gemuk-gemuk, sehat-sehat, juga pakannya bertahan lama. Awet mbk. Terus kotoran hasil pakan yang dicerna ini juga kalau dibuat pupuk bagus mbk.”

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Nanik Riyanto, pada 26 April 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Pri Selaku Peserta Pelatihan Fermentasi Pakan Ternak Sekaligus Salah Satu Anggota PERCATU, pada 26 April 2021.

Bapak Pri kembali mengatakan bahwasanya masyarakat sekitar menganggap bahwa beliau adalah salah satu contoh penyandang disabilitas yang mampu mandiri atas keterbatasan yang beliau miliki.

“Lek wong-wong kene i nggak mandang remeh mbk. Wong ya aku biasa nyapo-nyapo dhewe. Koyok ngene iki engkoaku diken nekani undangan tahlilan ya biasa. Saben sabtu aku mubeng nariki dhuwit pulsa barang mbk. Ya intine memang wong kene iki wis biasa mbk. Ya wis pada umume ngono kae lah.”⁹⁸

“Kalau orang-orang sini itu nggak memandang remeh mbk. Saya itu ngapa-ngapain ya terbiasa sendiri. Nanti saja saya itu diundang buat menghadiri tahlilan giliran ya sudah biasa. Setiap Sabtu saya ya keliling nagih uang pulsa juga mbk. Ya intinya orang sini itu sudah biasa mbk. Ya seperti pada umumnya lah mbk.”

Dengan adanya upaya demikian, para penyandang disabilitas dapat mewujudkan pemberdayaan sosial bagi dirinya sendiri. Kemudian, dengan adanya akses untuk pemberdayaan sosial itulah para penyandang disabilitas dapat bebas dari stigma masyarakat.

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Menyediakan Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas diwujudkan di berbagai bidang. Berikut uraiannya.

a. Bidang Ekonomi

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas di

⁹⁸ *Ibid.*

bidang ekonomi adalah dengan peningkatan keterampilan dari para penyandang disabilitas. Upaya peningkatan keterampilan tersebut salah satunya dilakukan dengan mengadakan berbagai macam pelatihan bagi mereka. Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini merupakan wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, memberikan berbagai macam pelatihan bagi para penyandang disabilitas. Hal ini lah sesuai dengan penuturan Bapak Setiaji selaku Kasi Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

“Kalau pelatihan tahun 2019 ada ini tata rias rambut, 2020 shibori, ecoprint, pelatihan smartphone android, sama fermentasi pakan ternak.”⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kasi Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, pada 13 April 2021.

Tabel 4.2. Pelatihan yang Diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung

No.	Pelatihan	Tahun	Jumlah Peserta	Waktu	Tempat
1.	Tata Rias Rambut	2019	20 orang penyandang disabilitas sensorik rungu wicara	4 hari	SLB Bintara Campurdarat Tulungagung
2.	Batik Shibori	2020	10 orang penyandang disabilitas fisik dan 10 orang disabilitas sensorik rungu wicara	4 hari	El HIjaaz <i>Boutique</i> dan <i>Craft</i> Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol
3.	Penggunaan <i>Smartphone Andorid</i>		20 orang penyandang disabilitas sensorik netra	4 hari	Warung Bima Tulungagung
4.	Batik <i>Ecoprint</i>		25 orang penyandang disabilitas fisik	4 hari	El HIjaaz <i>Boutique</i> dan <i>Craft</i> Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol
5.	Fermentasi Pakan Ternak		25 orang penyandang disabilitas fisik	4 hari	El HIjaaz <i>Boutique</i> dan <i>Craft</i> Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung¹⁰⁰

¹⁰⁰ Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, dirasa sangat membantu para penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut dapat ditemui dengan adanya penyandang disabilitas yang mengembangkan keterampilan dari pelatihan yang diberikan, sehingga mampu membantu mereka dalam segi perekonomian. Bahkan mereka menekuni kemampuan yang diperoleh dari pelatihan, menjadi sumber penghasilan utama. Hal tersebut sebagaimana penuturan dari Bapak Syafi'i selaku Pendamping Penyandang Disabilitas (PPD) Kabupaten Tulungagung.

“Sebelum pelatihan-pelatihan ini mereka itu ada usaha mbk. Justru ini, kayak Bu Nanik itu, sekarang *ecoprint* itu dijadikan yang utama mbk. Dulu dia itu daur ulang sampah, nah sekarang itu yang dijadikan tumpuan itu malah *ecoprintnya*. Ya daur ulangnya ya tetep jalan. Nah, sebenarnya yang saya minta dari pelatihan itu ya begitu, bukan hanya sekedar cuma pelatihan saja.”¹⁰¹

Walaupun kemampuan yang diperoleh Ibu Nanik mampu meningkatkan perekonomian beliau, beliau juga mengeluhkan bahwasanya pemasaran produk batik buatan beliau masih sangat sulit apabila tidak ada orang yang mendukungnya.

“Pemasaran sakjane angel mbk lek ngge wong ngene iki mbk, lek nggak enek sing mbawa angel mbk. Ngeten niki sing bantu rencange mbk, lek adol dhewe kangelan mbk, soale regane larang mbk, sekitar 200 mbk. Lek sing wis enten namane nggih 200 ndak boleh mbk. Koncone kula niku apik an ngonten lo mbk, dadi ngesakne ngono, akhire dibantu masarne niku. Alhamdulillah pun saking Belanda nggihan. Misale rencange

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Syafi'i, pada 26 April 2021.

mbeto 19 batik, mangke pajeng 17 nopo pinten ngonten kan Alhamdulillah mbk.”¹⁰²

“Pemasaran batik ini sebenarnya sulit mbk kalau untuk kalangan orang seperti saya, sulit mbk kalau tidak ada yang membantu. Ini saja saya dibantu teman saya mbk, kalau dijual sendiri ya sulit mbk, soalnya harganya mahal mbak, sekitar Rp 200.000,00 mbk. Kalau yang sudah terkenal merknya ya Rp 200.0000,00 tidak dapat mbk. Kebetulan teman saya itu orangnya baik mbk, jadi kasihan sama saya, akhirnya saya dibantu memasarkan produk ini gitu. Alhamdulillah pemasarannya juga sudah sampai Belanda. Misal teman saya bawa 19 batik ya mbk, ya nanti laku 17 atau berapa gitu, kan Alhamdulillah mbk.”

Bu Nanik juga kembali menuturkan bahwasanya pemasaran produk batik buatan beliau memang sangat diperlukan dikarenakan adanya keterbatasan modal.

“Masalah batik niki niku modale modal titik mbk, lek misale wis dadi ya kudu ndang didudoh-dudohne ndek wong-wong mbk. Muter mbk kersane. Lek payu kan nggih kenek ngge tumbas kain malih mbk.”¹⁰³

“Batik ini itu modalnya modal sedikit mbk, jadi kalau sudah jadi ya harus segera dipasarkan mbk. Biar muter gitu uangnya. Kalau laku kan ya uangnya bisa buat beli kain mbk.”

Selain Ibu Nanik, Ibu Suci selaku peserta pelatihan batik *shibori* dan *ecoprint* juga menuturkan bahwasanya pemasaran dan modal adalah kesulitan yang dialami oleh beliau dalam pembuatan batik tersebut.

“Sampai sekarang ya masih buat batik mbk, tapi kesulitane itu di modal sama pemasarannya mbk.”¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Suci, pada 26 April 2021.

Berbeda dengan Ibu Nanik, Ibu Suci mengatakan bahwasanya pembuatan batik ini beliau jadikan sebagai usaha sampingan. Berikut penuturan beliau.

“Sebelum enten pelatihan niki ya usahane njahit mbk. Njahit baju, kadang tas-tas buat adah hp, itu lo mbk dari spunbond. Jadi shibori kalih ecoprint niku ya buat sampingan mbk.”¹⁰⁵

“Sebelum adanya pelatihan ini, saya menjahit mbk. Menjahit baju, kadang menjahit tas-tas wadah hp yang terbuat dari kain spunbond. Jadi shibori dan ecoprint ini ya hanya untuk sampingan mbk.”

Pelatihan yang diadakan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini dibawah wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dinilai mampu mendorong perekonomian para penyandang disabilitas. Dengan meningkatnya perekonomian para penyandang disabilitas, mampu membuat para penyandang disabilitas lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih dihargai dilingkungan sekitarnya. Hal inilah yang membuat para penyandang disabilitas dapat dikatakan berdaya secara sosial. Selain mampu mencukupi segala kebutuhan pribadinya, para penyandang disabilitas yang berdaya dianggap bukan sebagai beban lagi bagi orang lain.

Berbeda dengan yang dirasakan oleh Ibu Suci dan Bapak Pri, Bu Nanik justru menganggap bahwasanya hanya sebagian masyarakat yang mendukung usaha beliau untuk berdaya. Tidak sedikit masyarakat yang bersikap acuh tak acuh. Berikut penuturan beliau.

¹⁰⁵ *Ibid.*

“Tanggapane wong-wong kampung ya kayak gitu. Sakjane ya kadang ya takkon ngewangi nggulungi mbk lek pas anakku repot, tapi ya wong-wong tertentu. Ya sebenere kampung sini semua sudah tahu mbk, ya mereka seneng. Ya itu, mau beli ndak nduwe dhuwit alesane mbk, tapi ya ndak papa wong ya ndak tak jual disini. Kalau menyepelkan itu ya ndak mbk. Ya itu tadi ada yang ndukung, yang cuek juga banyak, ya biasa mbk wong kampung kan ya gitu.”¹⁰⁶

“Tanggapan orang-orang kampung ya kayak gitu. Sebenarnya kadang saya minta bantuan buat menggulung kain kalau anak saya repot, tapi ya hanya orang tertentu mbk yang saya mintai tolong. Sebenarnya semua orang kampung sini sudah tahu mbk, ya mereka senang. Ya mau beli katanya nggak punya uang, tapi ya nggak papa mbk, toh saya jualnya juga nggak disini. Kalau menyepelkan saya juga nggak mbk. Yang dukung ya ada, yang cuek juga banyak, biasa mbk namanya orang kampung ya seperti itu.”

Beliau juga menambahkan bahwasanya yang membuat masyarakat kurang begitu tertarik untuk mendukung beliau adalah karena masyarakat sekitar menganggap bahwasanya harga batik yang diproduksi oleh beliau terlampau tinggi. Namun, Ibu Nanik menganggap bahwasanya harga yang beliau tetapkan sebanding dengan tingkat kesulitan saat proses produksi dan keunikan motif dari batik tersebut.

“Lek masalah harga mbk, lek ngge wong sing seni ya sudah tahu harga berapa mbk. Lek wong biasa ya wegah mbk, pilih ditukokne beras ae. Iku tonggoku, pas kula mepe mesthi muni kok apik-apik yoo, pengen tuku lah, tapi kok larang, malah pilih ngge tuku beras ae entuk akeh. Wong nggih sakjane prosese niki yo rumit o mbk. Ngenten niki lek ngeco kedah nunggu anak e prei mbk. Lha mangke kan nggih nggulung barang. Lek mboten dibantu nggih mboten saget tangane niki. Sakrehne pengen berusaha ya pripun malih. Kula nggih sabar mawon mbk lek enten tanggi-tanggi muni ngonten i.”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Nanik Riyanto, pada 26 April 2021.

¹⁰⁷ *Ibid.*

“Kalau masalah harga mbk, untuk kalangan orang penyuka seni ya sudah tahu harga pasaran batik ini mbk. Tapi untuk kalangan orang biasa ya mereka kemahalan mbk, pilih dibelikan beras saja. Ini tetangga saya, ketika saya menjemur batik gitu pasti mereka bilang, kok bagus-bagus ya, pengen beli tapi kok mahal, mending dibelikan beras nanti dapat banyak. Ya sebenarnya proses pembuatan batik ini ya rumit lo mbk. Buat batik gini saya harus nunggu anak saya libur sekolah dulu mbk. Kalau nggak gitu gimana, kan ya nanti perlu proses menggulungnya juga. Kalau nggak dibantu ya nggak bisa tangannya ini mbk. Karena saya ingin berusaha, ya mau gimana lagi ya mbk. Saya ya cuma bisa sabar kalau ada tetangga yang berbicara seperti itu mbk.”

Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini merupakan wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung memang bukanlah satu-satunya solusi guna menjadikan penyandang disabilitas lebih berdaya. Namun, adanya pelatihan ini diharapkan mampu memberikan jalan kepada para penyandang disabilitas, guna menjalankan fungsi sosialnya seperti masyarakat lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Setiaji.

“Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas bukan sebagai satu-satunya solusi. Namun dengan memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas diharapkan dapat sedikit mengurangi permasalahan sosial penyandang disabilitas. Minimal para penyandang disabilitas mendapatkan haknya sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari yang sama dengan masyarakat lainnya.”¹⁰⁸

Selain mengadakan pelatihan di Kabupaten Tulungagung, guna meningkatkan keterampilan para penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung juga memfasilitasi para penyandang

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Setiaji, pada 19 April 2021.

disabilitas yang berkeinginan mengikuti pelatihan keterampilan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Pelatihan keterampilan merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikut penuturan dari Bapak Setiaji.

“Kalau punya provinsi itu namanya UPT. Kalau punya kemensos itu namanya Balai.”¹⁰⁹

Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Balai milik Kementerian Sosial Republik Indonesia, para penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung dapat mengembangkan potensinya dalam berbagai macam pelatihan sesuai dengan kondisinya. Hal tersebut dijelaskan pula oleh Bapak Setiaji selaku Kasi Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

“Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya:

- 1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri dan Pasuruan untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental / gangguan jiwa yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosialnya agar dapat hidup normal dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.
- 2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik netra yang memberikan pelatihan orientasi medan, baca tulis braille, keterampilan pijat, pelatihan komputer, dll.
- 3) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik yang memberikan pelatihan servis elektronik, bengkel, dan menjahit.
- 4) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual yang memberikan pelatihan menjahit dan menyulam, sablon dan cetak, olahan pangan, dll.

¹⁰⁹ *Ibid.*

- 5) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu wicara Pasuruan untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas rungu wicara yang memberikan pelatihan servis elektronik, dan tata rias.

Balai milik Kementerian Sosial RI, diantaranya:

- 1) Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual yang memberikan pelatihan batik ciprat dan barista.
- 2) Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Prof. Dr. Soeharso Surakarta untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik yang memberikan pelatihan bengkel, cocok tanam, dan batik ecoprint.
- 3) Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Prof. Dr. Soeharso Surakarta untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik yang memberikan pelatihan bengkel, cocok tanam, dan batik ecoprint.
- 4) Balai Mahatmiya Bali untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik netra yang memberikan pelatihan pijat, komputer, dan barista.¹¹⁰

Beliau juga menegaskan bahwasanya dalam hal memberdayakan para penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung hanya berperan sebagai fasilitator saja.

“Kita hanya memfasilitasi mereka, namanya monev yaa. Paling yaa setahun dua kali. Setelah itu kalau kita anggap mampu, ya kita lepas. Contohnya ya itu, ada yang dari Tulungagung di kirim ke Balai di Bali. Nah nanti setelahnya kan dapat bantuan, habis dari sana nanti kita cek, piye (bagaimana) ada perkembangan atau nggak. Ya ibarate tergantung dek e (dia) mau mengembangkan atau tidak. Bisa juga begini, hasil dari pelatihan ini jadi sampingan. Contohnya, dia sudah punya pekerjaan, misal dagang, terus ada pelatihan-pelatihan, nah otomatis selain jualan kan ya bisa mengembangkan pelatihannya itu tadi.”¹¹¹

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

Beliau kembali menuturkan bahwasanya Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung selalu menginformasikan dan menghimbau para penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Sosial RI.

“Ketika pusat itu mengumumkan, nah terus dari disabilitas itu kita tawari, kita informasikan, kalau dia mau ya kita kirim. Dari sana itu rutin setahun kalo ndak salah itu dua angkatan. Toh juga nggak ada tesnya buat ikut itu. Cuma ketentuan misal umur, tidak cacat ganda, kalau netra fisik itu, kalau fisiknya ringan itu ndak papa, bersedia selama pelatihan tidak menikah. Kadang-kadang kita itu, kalau dari mereka sendiri nggak ada yang minat, kalau tidak ada yang tertarik kan ya sulit. Jadi kalau ada surat, kita terima, kalau ada yang minat kan mereka ngomong. Nanti kita jelaskan teknis, syaratnya seperti apa, nanti kita kirim. Kalau ndak ada yang minat ya lewat. Belum tentu 3 bulan atau 4 bulan lagi kan ada angkatan selanjutnya, belum tentu angkatan ini nggak mau, bisa jadi angkatan selanjutnya ya dia pengen. Kalau ndak berpartisipasi ya ndak ada sanksi, ya ndak boleh beri sanksi. Ya kita hanya menghimbau, memberi motivasi, eman-eman (sayang) lo kesempatan seperti ini. Yang dikirim-kirim itu sementara masih di Bali. Ini rencananya mau ngirim.”¹¹²

Salah satu dampak positif bagi penyandang disabilitas yang ikut serta dalam pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Sosial RI adalah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Rasa percaya diri inilah merupakan hal penting bagi para penyandang disabilitas untuk mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Berikut penuturan Bapak Syafii selaku pendamping penyandang disabilitas (PPD) Kabupaten Tulungagung.

“Kemarin itu ada yang namanya Toni mbk, saya kirim ikut pelatihan di Bali itu. Ke Bali itu pun orang tuanya hampir nolak mbk, karena takutnya anaknya nggak mampu kan. Nah,

¹¹² *Ibid.*

perubahan drastis ya mbk, sepulang dari Bali. Dia makin pede. Disana ada pelatihan pijat, komputer, barista juga khusus tuna netra. Bayangin orang tuna netra main komputer. Dia ikut pelatihan disana 6 bulan. 6 bulan dikasih stimulan sama balainya. Yang mendalami pijat ya diberi bantuan alat pijat, yang diberikan laptop juga ada. Ini ada dua orang yang sama laptop itu sudah terbiasa.”¹¹³

Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas diatas merupakan program rutin setiap tahun, baik itu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung maupun UPT dan Kementerian Sosial RI. Berdasarkan penuturan Bapak Setiaji diatas, pelatihan yang diikuti oleh para penyandang disabilitas dengan penyelenggara diluar Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung hanya sebatas pelatihan yang berada di Balai Bali. Pada kenyataannya, penyelenggara pelatihan keterampilan tidak hanya di satu UPT ataupun Balai. Hal tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai referensi bagi Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam memfasilitasi penyandang disabilitas yang ingin lebih mengasah keterampilannya di berbagai bidang.

Selain hal diatas, masalah anggaran adalah faktor yang menyebabkan pelatihan keterampilan kurang berjalan secara maksimal. Terlebih lagi, sejak adanya pandemi covid-19, membuat penganggaran untuk pelatihan keterampilan di tahun 2021 masih dirasa sulit. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Setiaji.

“Sayangnya, di tahun 2021 ini kita ndak ada pelatihan sama sekali. Karena kita ini ada perubahan di peremendagri, jadi

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Syafi'i, pada 28 April 2021.

untuk menganggarkan kesitu masih sulit. Selain itu ya masih fokus di covid, jadi agak sulit. Terus terang tahun ini kita agak vakum lah. Kalaupun ada ya mungkin dalam bentuk pembinaan ke komunitas gitu-gitu. Masih belum sampai ngasih apa atau pelatihan apa begitu. Karena dia (difabel) kan ada kumpulannya, jadi kita ya sebatas datang, memberikan bimbingan mental, spiritual, motivasi, dan lain sebagainya. Jadi intinya hanya sebatas itu sementara.”¹¹⁴

Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai aspek pemerintahan. Selain anggaran yang harus dialihkan di bidang kesehatan, pandemi covid-19 juga membuat beberapa instansi pemerintahan memperketat protokol kesehatan guna menekan penyebar virus. Begitu juga yang dilakukan oleh Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) Abiyoso. BLBI Abiyoso dengan terpaksa meniadakan pelatihan khusus bagi tuna netra guna menekan penyebaran virus. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Bapak Setiaji.

“Ada namanya BLBI Abiyoso, itu untuk tuna netra, itu nanti khusus braille, baca tulis, sama *al-Quran*. Pengembangannya ada komputer berbicara. Ya komputer khusus tuna netra. Rencananya tahun ini mau ikut partisipasi, tapi terkait teknisnya, masih belum tahu. Tapi selama covid ini, dia kan tidak menerima, jadi kita yang ngajukan begitu. Cuma kapan-kapane kita masih belum tahu.”¹¹⁵

Pelatihan braille sangat diperlukan bagi para penyandang disabilitas tuna netra, terlebih lagi bagi tuna netra yang sebab disabilitasnya tidak bawaan lahir. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari Bapak Syafi’i.

“Buat tuna netra saya narik BLBI juga, tapi masih sebatas asesmen sih, mungkin pelaksanaannya habis lebaran.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Setiaji, pada 13 April 2021.

¹¹⁵ *Ibid.*

Kaitannya dengan baca tulis, braille, ada juga manajemen *intermarketing*. Tapi fokusnya di braille itu dulu. Soalnya itu penting o mbk. Kan kebanyakan mereka itu nggak ngenal braille mbk, apalagi yang nggak sekolah slb dari kecil. Kan mereka itu sebab disabilitasnya ada juga yang pas sudah dewasa, jadi memang dulu nggak sekolah di slb. Contohnya ada yang namanya Ali, itu dia netra pas SMA karena kecelakaan. Terus ada juga Toni itu juga nggak sekolah slb. Padahal braille itu kan dibutuhkan ya mbk. Nah repote, karena mereka sudah bisa HP, jadi ya agak kurang tertarik gitu. Tapi ya nggak papa, mereka tetep ngikuti kok nantinya. Beda yang dari lahir, itu buat belajar braille kan semangat.”¹¹⁶

Pelatihan keterampilan yang telah disebutkan diatas memang terbukti dapat meningkatkan keterampilan dari tiap-tiap individu penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung dan juga bagi sebagian penyandang disabilitas dapat membuka jalan perekonomian mereka. Namun efektivitas dan manfaat dari pelatihan tersebut dapat benar-benar dirasakan apabila mereka mampu mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh tersebut serta ada faktor pendukung lainnya. Berikut penuturan dari Bapak Setiaji.

“Efektivitas pelatihan itu sangat tergantung dari minat dan bakat dari peserta pelatihan serta faktor pendukung lainnya, misalnya pemasaran produk / kebutuhan pasar. Peserta yang mempunyai minat dan bakat yang sesuai ditunjang tingkat kebutuhan produk yang tinggi akan semangat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan keterampilannya sehingga terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun sebaliknya, ada beberapa peserta yang ternyata tidak berminat untuk mengembangkan keterampilannya secara serius. Namun minimal peserta mempunyai keterampilan dasar yang barangkali suatu saat dapat digunakan untuk menunjang pendapatan keluarga.”¹¹⁷

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Syafi’i, pada 28 April 2021.

¹¹⁷ *Ibid.*

Pelatihan keterampilan ini juga tidak lepas dari kendala-kendala. Mulai dari kendala pada anggaran penyelenggaraan, maupun bagaimana menumbuhkan minat para penyandang disabilitas untuk tetap mengaplikasikan hasil dari pelatihan ini. Berikut penuturan Bapak Setiaji.

“Kendala yang dialami itu ya pertama ya anggaran. Mulai dari 2019-2021 ini sangat minim karena ada pandemi. Dulu 2019 kan kita masih gabung sama KB, ya banyak anggarannya, tapi kan untuk satu dinas, ya nanti ke disabilitasnya jadi kecil. Kedua, mental. Ada disabilitas secara mental belum bisa mandiri. Ketika mereka ikut pelatihan ya bisa mereka, tapi untuk selanjutnya ya ada yang masih bingung, dan belum percaya diri. Kecuali bagi mereka yang memang sudah lama. Dan kadang gini, pelatihan yang kita beri ini sifatnya tambahan. Jadi yang kita pilih itu ya mereka yang sudah mandiri, maksudnya mandiri tu begini, minimal dia sudah ada usaha, jadi pelatihan ini bisa buat tambahan. Jadi kalau gitu kan dia sudah mandiri, percaya diri. Kalau yang benar-benar mulai dari nol, itu yang agak sulit, harus dibangkitkan dulu motivasinya, dan dengan waktu pelatihan yang hanya sekian hari itu ya ndak cukup. Tapi memang, dari pelatihan-pelatihan kemarin itu yang cukup menonjol dari ecoprint. Ya dari 25 peserta, ya ada lah 10 orang yang aktif. Mungkin mereka kendalanya dipemasaran. Bener semangat nggawe, bisa juga, tapi karena kendala pemasaran ya agak susah. Hanya ada satu dua yang kalau dia punya relasi diluar, itu bisa berjalan pemasarannya. Ada yang kemarin sampai belanda. Ya itu apa ne ngono bantu pemasaran, akhirnya cocok, sampai beberapa kali kirim, akhirnya yaa jadi buka jalan pemasarannya kan.”¹¹⁸

Selanjutnya Bapak Setiaji juga menuturkan bahwasanya pasca mengikuti pelatihan keterampilan tersebut, para penyandang disabilitas diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dirinya, senantiasa berlatih,

¹¹⁸ *Ibid.*

membuka peluang usaha, dan mengajak penyandang disabilitas lain untuk mandiri. Berikut penuturan beliau.

“Harapannya pasca ikut pelatihan ya ini:

- 1) Senantiasa meningkatkan kapasitas dirinya dengan terus belajar dari berbagai sumber.
- 2) Berlatih terus untuk meningkatkan kemampuan keterampilannya.
- 3) Membuka peluang usaha agar bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang lain.
- 4) Dalam jangka panjang diharapkan dapat mengajak atau melibatkan penyandang disabilitas lainnya agar mandiri dalam berbagai aspek usaha sesuai keterampilan masing-masing”¹¹⁹

Pelatihan keterampilan merupakan salah satu cara agar para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Guna mengembangkan keterampilan yang telah mereka dapat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung juga memberikan para penyandang disabilitas fasilitas lain. Fasilitas seperti pemberian bantuan, membantu menghubungkan ke sumber permodalan, maupun membantu memasarkan produk dari para penyandang disabilitas merupakan beberapa upaya dalam meningkatkan pemberdayaan terhadap para penyandang disabilitas dari segi ekonomi. Berikut pemaparan dari Bapak Setiaji.

“Untuk memfasilitas para penyandang disabilitas pasca pelatihan agar menjadi individu yang berdaya dari segi perekonomian ya bisa dengan:

- 1) Dinas Sosial menghubungkan dengan sumber-sumber permodalan (perbankan dan koperasi).
- 2) Dinas Sosial membantu pemasaran produk melalui kegiatan pameran produk di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

¹¹⁹ *Ibid.*

- 3) Dinas Sosial membantu penyaluran bantuan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung.” Peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung sebagai fasilitator belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan, ragam pelatihan yang diberikan belum terlalu bervariasi. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung juga belum secara keseluruhan ikut berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh UPT maupun Balai. Untuk itu, dukungan dan motivasi kepada para penyandang disabilitas harus selalu ditingkatkan guna meningkatkan minat dan bakat mereka.”¹²⁰

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Setiaji, pada 26 April 2021.

Tabel 4.3. Data Penerima Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung

No.	Jenis Bantuan	Banyak Penerima	Keterangan
1.	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas	97 orang	Tahun 2020 (Kementerian Sosial Republik Indonesia)
2.	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	244 orang	Tahun 2021 (Provinsi Jawa Timur)
3.	Program Keluarga Harapan (PKH)	564 KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	
4.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Sembako		Untuk umum dan penyandang disabilitas
5.	Bantuan Sosial Tunai / BST		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung¹²¹

¹²¹ Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

Selain bantuan diatas, bantuan terhadap penyandang disabilitas juga diberikan bagi mereka yang mengikuti pelatihan. Berikut penuturan dari Bapak Syafii.

“Misal pelatihan fermentasi pakan ternak ya mbk. Langkah dari balai kemarin itu kan bantuan 2 juta itu bisa dimanfaatkan buat beli kambing, biar hasil nanti bisa ditenakkan dan sekaligus buat nerapkan hasil pelatihan fermentasi pakan itu. Pelatihan shibori dan ecoprint pun juga begitu mbk, habis pelatihan dapat bantuan 2 juta per orang.”¹²²

Adanya bantuan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas menjadikan mereka mampu berdaya dalam segi perekonomian. Oleh karenanya, penyaluran bantuan yang ditujukan kepada para penyandang disabilitas hendaknya tepat sasaran, agar bantuan tersebut benar diterima oleh mereka yang benar-benar lebih membutuhkan. Agar penyaluran bantuan tepat sasaran, maka pendataan terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung harus dilakukan dengan teliti agar pemberdayaan kepada para penyandang disabilitas dapat terselenggara dengan baik. Untuk itu, verifikasi data sangat diperlukan dalam pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung. Berikut penuturan Bapak Syafii.

“Data yang sudah saya verifikasi sekitar 500 an, itu yang belum saya verifikasi sekitar 7500 an. Kadang itu kalau dari desa itu gini mbk. Yang sakit, dianggap desa itu miskin itu disabilitas mbk. Jadi interprestasinya beda-beda, perlunya verifikasi data ya gitu mbk. Biar kedepannya itu tepat sasaran.”¹²³

¹²² Wawancara dengan Bapak Syafii, pada 29 April 2021.

¹²³ *Ibid.*

Bapak Syafii juga menambahkan bahwasanya dalam pendataan penyandang disabilitas Kabupaten Tulungagung beliau kerjakan seorang diri. Beliau menikmati hal tersebut dan menganggap hal ini sebagai cara beliau dalam membantu para penyandang disabilitas. Berikut penuturan beliau.

“Data-data gini saya sendiri mbk. Soalnya jadi PPD sendiri ya enjoy aja. Itung-itung bantu mereka, tambah teman juga. Sebenarnya, pendamping provinsi itu ada juga mbk. 4 orang, kalau saya kan dari kementerian. Tapi ya itu, yang 4 orang itu kurang aktif mbk. Kalau kesulitan juga nggak mbk, ya itu tadi enjoy.”¹²⁴

Walaupun Bapak Syafii tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan penyandang disabilitas seorang diri, namun beliau beranggapan bahwasanya pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung akan lebih mudah dan efisien jika tidak dilakukan seorang diri. Berikut penuturan beliau.

“Sebenarnya data data gini lebih mudah kalau ada TKSPD nya mbk. Kalau ada TKSPD nya itu lebih memudahkanlah, ada temennya kan mbk. Ya nanti verifikasinya juga lebih cepat gitu. TKSPD itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. TKSPD juga dari kementerian juga. Ya kebetulan disini nggak ada mbk.”¹²⁵

Pendataan terhadap penyandang disabilitas bertujuan guna melakukan penyesuaian akses dan bantu bagi para penyandang disabilitas di berbagai kesempatan. Seperti halnya pendataan penyandang disabilitas diperlukan pada saat menjelang pemilihan umum (pemilu) guna memberikan kemudahan akses saat berpartisipasi

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

pada pemilu. Selain itu, pendataan penyandang disabilitas juga memudahkan mereka dalam menerima bantuan dari pemerintah.

b. Bidang Sosial

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tidak jarang membuat beberapa pihak mengambil keuntungan dari hal tersebut. Dengan keterbatasan yang dimiliki para penyandang disabilitas tersebut, tak jarang terdapat beberapa pihak yang memanfaatkan hal tersebut guna mendapatkan belas kasihan orang lain. Hal tersebut merupakan salah satu alasan adanya penyandang disabilitas yang dieksploitasi untuk mengemis di jalan. Namun, adanya penyandang disabilitas yang mengemis di pinggir jalan, tidak jarang pula itu atas kemauan mereka. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Bapak Setiaji.

“Jadi artinya dieksploitasi itu kan ada orang yang mengeksploitasi. Pengemis yang di jalan itu belum tentu dieksploitasin juga lo. Kita kan ndak tahu, bahkan bisa jadi mereka itu mengemis karena kemauan mereka sendiri.”¹²⁶

Selain itu, Bapak Syafii juga menuturkan bahwasanya penyandang disabilitas yang mengemis di jalan pada dasarnya sulit untuk diarahkan. Berikut penuturan beliau.

“Karena yang sudah nyaman jadi pengemis itu rata-rata mereka sulit diarahkan. Dan saya pun juga kurang nyaman karena biasanya ada sindikat.”¹²⁷

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Setiaji, pada 5 April 2021.

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Syafii, pada 28 April 2021.

Penyandang disabilitas yang mengemis di jalan pun juga mendapatkan penanganan seperti pembinaan mental dan sosial oleh Dinas Sosial. Berikut penuturan Bapak Setiaji.

“Penanganan terhadap para penyandang disabilitas yang mengemis itu diantaranya:

- 1) Razia oleh Satpol PP.
- 2) Pembinaan mental dan sosial oleh Dinas Sosial.
- 3) Mengembalikan ke keluarganya bila masih ada (dalam kota maupun luar kota).
- 4) Mengirimkan ke UPT milik provinsi Jawa Timur sesuai ragam disabilitasnya.”¹²⁸

Bapak Setiaji juga menambahkan bahwasanya penanganan penyandang disabilitas yang mengemis tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor. Seperti halnya, mereka yang mengemis memang karena kemauan diri sendiri, atau bahkan karena tidak ada keluarga yang mengakui penyandang disabilitas yang mengemis ini. Berikut penuturan Bapak Setiaji.

“Secara umum kalau gepeng, gelandangan dan pengemis, baik itu disabilitas atau bukan, secara umum itu ya salah. Karena pertama gini, kita tidak punya penampungan, di Kabupaten itu ndak ada. Adanya itu ya panti punya provinsi. Kalau gepeng itu di UPT (Unit Pelayanan Teknis) nya provinsi. Itupun pasti daya tampungnya juga terbatas. Ya gimana, melayani satu jawa timur. Sebetulnya kalau kita semua kerja sama ya bisa lah. Balik lagi ya, ini bukan tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat juga. Kalau hanya pemeirntah aja, atau dinsos aja ya kewalahan. Contoh ya yang agak ekstrim odgj. Odgj itu kan ya disabilitas mental. Mereka itu ada keluarganya, tapi ndak mau ngakui, ndak mau nerima juga, terus piye ngono iku. Ngono iku arepo diomongi dimotivasi piye ae ya uangel. Ada beberapa kasus yang seperti itu, dia sudah dibawa rsj, kemudian dari rsj kan sudah cukup bagus yaa, kemudian kita kan juga ada rehabilitasi sosial bina laras ya dikediri, itu punya provinsi, itu buat negmbalikan

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Setiaji, pada 29 April 2021.

sosialnya. Kalau di rsj kan secara mental atau kesehatan kejiwaannya ya, kalau rehabilitasi sosial ini untk ngembalikan sosialnya, bagaimana dia berbaur dengan orang atau semacamnya lah. Di rehabilitasi dikatakan sudah cukup bagus ya, seharusnya kan dikembalikan ke keluarganya, terus keluargane wegah, piye jajal. Kalau bina laras itu buat odgj, bukan buat disabilitas fisik aja. Kalau yang fisik kayak e ndak ada. Kalau penampungan itu di kabupaten atau kota se jatim paling yang punya cuma 2, itu karena butuh anggaran besar, tenaga banyak. Kita sebenarnya juga punya rencana. Kalau dikabupaten itu namanya selter ya. Selter itu masih berjalan, adanya di Beji, sdm nya juga belum ada, masih dalam proses. Fungsinya buat penampungan semnetara. Gepeng itu disalurkan atau ndak. Kalau dia orang Tulungagung kan bisa langsung dikembalikan, kalau luar kota ya masih dicoba, tapi misalkan belum ada kejelasan masuk selter dulu, rencananya begitu, maksimal 7 hari. Karena kewenangan dari kabupaten ya Cuma 7 hari. Berarti selama 7 hari ini kita harus berusaha, gepeng-gepeng ini dibawa kemana. Kalau yang kaitannya fisik itu contohnya di Malang, Bangil. Kalau punyanya pusat (kemensos) itu namanya Balai, ada di Temanggung untuk disabilitas intelektual. Kalau yang di Bali khusus untuk tuna netra, kalau di cimahi khusus tuna netra yang Braille, namanya BLBI (Balai Literasi Braille Indonesia).”¹²⁹

Adanya penyandang disabilitas yang mengemis merupakan tanggung jawab bagi pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat bertugas memberi dorongan kepada para penyandang disabilitas agar mampu lebih berdaya dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga nantinya mereka mampu bertahan hidup tanpa belas kasihan dari orang lain. Sedangkan pemerintah setempat bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya para penyandang disabilitas adalah orang yang mampu berdaya dengan usaha mereka sendiri, sehingga masyarakat tidak perlu lagi memandang remeh para penyandang disabilitas.

¹²⁹ *Ibid.*

Penanganan terhadap penyandang disabilitas yang mengemis diatas merupakan salah satu peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas di bidang sosial. Walaupun penanganan terhadap penyandang disabilitas yang mengemis tidaklah mudah, tapi setidaknya dengan memberikan pembinaan mental dan sosial bagi mereka yang mengemis, itu merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan mereka. Selanjutnya, pengoptimalan fungsi selter sebagai tempat penampungan sementara, diharapkan mampu membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan upaya pemberdayaan sosial bagi gelandangan dan pengemis, termasuk penyandang disabilitas didalamnya.

c. Bidang Olahraga

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini melalui Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, juga membentuk NPC tingkat Kabupaten. NPC atau disebut dengan *National Paralympic Committee* adalah organisasi olahraga khusus bagi para penyandang disabilitas. Organisasi ini bertujuan guna menyalurkan bakat para penyandang disabilitas di bidang olahraga. Dalam pembentukan NPC ini, Kabupaten Tulungagung dikatakan terlambat dibanding dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Berikut penuturan dari Bapak Setiaji.

“NPC itu semacam koni, khusus disabilitas. Ini baru terbentuk beberapa bulan kemarin. Untuk para disabilitas kalau mau

menyalurkan bakatnya dibidang olahraga. Di beberapa kabupaten itu sudah ada, di kita termasuk terlambat. Akhirnya atlet kita itu ikut kabupaten lain. Karena dulu disini belum ada, akhirnya ada yang ikut di Trenggalek, di Blitar. Ya gimana, baru terbentuk tahun ini, jadi seperti anggaran ya belum ada, terus ya jadwal latihannya juga masih belum ada juga, cuma anggotanya sudah terbentuk. Terus atlet yang awalnya ikut di trenggalek, di blitar, itu kita juga belum berani narik kesini, wong ibarate mereka itu besarkan namanya sama kan, terus ya ibaratnya mereka itu disana ya sudah dapat gaji, sednagkan kita kan masih belum ada anggarannya, jadi ya belum berani. Tapi minimal lembaganya sudah ada.”¹³⁰

Secara struktural, NPC (*National Paralympic Committee*) berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Namun, dalam hal pembinaan terhadap atlet penyandang disabilitas berada dibawah wewenang Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Berikut penuturan Bapak Setiaji.

“Kalau secara struktural, NPC itu dibawah dispora, tapi kalau secara pembinaan disabilitasnya ya di dinas sosial. Kita juga memfasilitasi, kita ke pemda, kita ke pak bupati, ke dispora, ke dpr, intinya piye ini amrih eksis, dapet honor dan lain sebagainya.”¹³¹

Berdasarkan penuturan Bapak Setiaji tersebut, dapat diketahui bahwasanya anggaran menjadi permasalahan awal dalam pembentukan NPC Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut juga dirasakan oleh Bapak Syafii selaku pendamping penyandang disabilitas sekaligus sebagai pengurus NPC bidang humas.

“Jujur mbk, kita nggak mendapatkan anggaran apa-apa dari pemerintah. Nah dikesempatan itu nanti kita coba minta mbk. Ya selama ini kita itu swadaya. Mau beli alat ya wul-wulan (iuran), beli konsumsi ya wul-wulan (iuran) juga. Bahkan

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

bener kata Pak Aji, 4 orang atlet Tulungagung itu ada yang lari ke Trenggalek. Tapi Alhamdulillahnya sudah bisa kita tarik lagi kesini. Bahkan dia itu sebelumnya mau dibuatkan ktp Trenggalek, cuman sama keluarganya nggak diperbolehkan. Jadi pihak Trenggalek pasrah menyerahkan ke Tulungagung lagi.”¹³²

Dari uraian diatas, permasalahan anggaran merupakan salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. Pada organisasi NPC sendiri anggaran menjadi kendala dalam kiprah awal organisasi ini. Namun demikian, adanya NPC patut diapresiasi karena para penyandang disabilitas memiliki wadah dalam menyalurkan potensi mereka di bidang olahraga.

d. Bidang Kesehatan

Dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung membantu penyaluran vaksin covid-19 gratis dari Kementrian Kesehatan. Adanya vaksin gratis kepada para penyandang disabilitas merupakan upaya memerangi pandemi yang tengah berlangsung, terlebih lagi para penyandang disabilitas adalah kelompok rentan. Oleh karenanya, perlunya vaksin ini guna membangun sistem kekebalan mereka. Berikut penuturan Bapak Syafi'i.

“Satu-satunya kabupaten di indonesia yang disabilitasnya sudah divaksin itu Tulungagung. Kemensos nyurati ke kementrian kesehatan sama ke dinas sosial kabupaten buat ngusulkan vaksin itu, Mbak. Terus berdasarkan itu, saya ngusulkan siapa-siapa saja, kemudian dilaksanakan vaksin

¹³² Wawancara dengan Bapak Syafii, pada 29 April 2021.

tahap satu. Tahap duanya 12 Mei 2021. Ada 100 orang yang divaksin, karena nggak semua mau, dan ada yang gagal, misalnya kurang gitu. Tempatnya vaksin di RS Prima Medika.”¹³³

Upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan memelopori penyaluran vaksin covid-19 bagi penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan yang harus diapresiasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berusaha dengan optimal dalam melakukan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

e. Bidang Hukum

Pemberdayaan penyandang disabilitas perlu diwujudkan dalam rangka pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 91 yang berbunyi:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹³⁴

Pemberdayaan sosial yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bagaimana cara penyandang disabilitas untuk memperoleh akses informasi, akses pengetahuan maupun keterampilan, dan akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berupaya dengan membuat regulasi maupun menyediakan wadah musyawarah

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 91.

perencanaan pembangunan khusus penyandang disabilitas. Hal ini berdasarkan penuturan dari Bapak Setiaji.

“Dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas melakukan upaya seperti:

- 1) Pemerintah daerah membuat regulasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat/ penyandang disabilitas.
- 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten yang ditindaklanjuti melalui program/kegiatan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.”¹³⁵

Guna mengimplemenntasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas, Pemrintah Daerah Kabupaten Tulungagung turut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh Pemprov Jatim. Kegiatan tersebut yakni musyawarah perencanaan pembangunan khusus bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasinya. Musyawarah ini disebut dengan Muspadi. Yang mana di tahun 2021 ini sebagai permulaan diadakannya musyawarah ini. Berikut penuturan dari Bapak Setiaji.

“Disabilitas itu juga punya hak yang sama, dalam rangka itu ya diadakan muspadi ini. Musyawarah perempuan, anak, dan disabilitas (muspadi) itu baru mulai tahun ini (2021). Rencananya mau rutin diadakan setiap tahun. Sebetulnya itu arahnya juga implementasi undang-undang. Itu tanggungjawab pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama. Muspadi ini rencananya mulai dari desa, desa nanti naik ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten ya sama dengan musrenbang gitu lah. Adanya muspadi ini ya biar disabilitas, perempuan, dan anak itu ya tersalurkan aspirasinya. Karena kalau di musrenbang, mereka ini seolah-olah tidak tersentuh, makanya diberi wadah khusus. Karena baru tahun ini, jadinya langsung diambil dari kabupaten. Nanti kedepannya ya bisa. Jadi usulan-usulan yang riil di bawah itu apa, nanti ditampung.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Setiaji, pada 29 April 2021.

nanti dari situ kan kita tahu kebutuhan-kebutuhan mereka itu apa. Jangan sampai top down dari atas ke bawah, jadi bukan dari atas punya apa gitu terus ditawarkan ke mereka gitu ya ndak begitu, belum tentu itu cocok dengan mereka kan yo, lek ndak ya gimana. Tapi tentu nanti kan ada mekanismenya juga, intinya ya dari usulan-usulan, naik ke atas, nah nanti baru dianggarkan untuk tahun depan. Nggak bisa langsung direalisasi saat ini ya ndak.”¹³⁶

Dengan keikutsertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam muspadi, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sadar bahwasanya para penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang memerlukan perhatian lebih guna terpenuhi hak-haknya.

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui beragam program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas tidak lain bertujuan agar membuat mereka menjadi kelompok yang lebih mandiri. Selain meningkatkan keterampilan para penyandang disabilitas, beragam program pemberdayaan dapat meningkatkan rasa percaya diri, sebagai sarana interaksi sosial, serta mampu mengubah paradigma masyarakat mengenai ketidakmampuan para penyandang disabilitas untuk mandiri.¹³⁷

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

3. Pandangan Ulama tentang Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung

Siyasah syar'iyah merupakan politik yang berlandaskan syariat Islam. Dalam kehidupan bernegara, Indonesia sendiri tidak terlepas dari mengadopsi nilai-nilai yang ada pada *siyasah syar'iyah*. Hal ini tersebut seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Aladin selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam Gendingan Tulungagung.

“Konsep *siyasah syar'iyah* sendiri berawal dari makna kata *siyasah syar'iyah*. *Siyasah* itu kan politik sedangkan *syar'iyah* itu entang politik Islam. Terkait yang dimaksud dengan konsep *siyasah syar'iyah* itu dalam perspektif Islam saya kira kita di dalam bernegara, walaupun Indonesia tidak memberlakukan syariat Islam atau hukum Islam sebagai hukum yang diberlakukan di dalam mengatur politik hukum di Indonesia, tetapi kan sedikit banyak politik Islam yang dipakai di Indonesia itu juga mengadopsi dari nilai-nilai *siyasah syar'iyah*. Jadi *siyasah syar'iyah* disini secara tekstual bisa kita artikan politik yang menggunakan perspektif hukum Islam didalam mengawal program program pemerintah.”¹³⁸

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Bapak KH Hadi Mohammad Mahfudz selaku Ketua MUI Kabupaten Tulungagung, yakni sebagai berikut.

“Siyasah syar'iyah itu maknanya adalah bagaimana nilai-nilai Islam bisa menginspirasi dan mengilhami tatanan kenegaraan. Seperti Pancasila, Pancasila itu intinya ya tentang nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, inspirasi nilai-nilai keislaman di dalam penataan kenegaraan itu bukan berarti agama ditunggangi untuk siyasah, tapi agama itu mewarnai siyasah.”¹³⁹

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Ladin selaku Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam Gendingan Tulungagung, pada 9 Juli 2021.

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak KH Hadi Mohammad Mahfudz selaku Ketua MUI Kabupaten Tulungagung, pada 17 Juli 2021.

Kemudian Bapak Ladin juga menambahkan bahwasanya nilai-nilai ketuhanan/keagamaan yang termaktub dalam Pancasila tidak lepas dari nilai-nilai ketauhidan dalam Islam apabila dikaji lebih dalam. Yang mana nilai yang dimaksud adalah nilai kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara. Berikut penuturan beliau.

“Walaupun Indonesia tidak memberlakukan hukum Islam di dalam hukum positif, tetapi sedikit banyak *siyasah syar’iyyah* ini bisa diaktualisasikan di dalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih mutlak lagi. *Siyasah syar’iyyah* ini juga sebagai nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia, walaupun secara tekstual tidak disebutkan di dalam Pancasila ya. Misal sila pertama itu kan ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah Ketuhanan Yang Mahasa Esa itu kan dalam Islam bisa kita samakan dengan nilai-nilai ketauhidan, cuma dalam hal ini nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, kalau kita kaji kembali itu sebenarnya berasal dari ruh pada nilai nilai yang ada dalam Islam. Namun demikian karena konteks kebangsaan kita itu adalah majemuk, nasional, tidak primordial, jadi cukup terwakili pada konsep Ketuhanan. Cukup meyakini bahwa semesta ini ada penciptanya. Dalam pemahaman aqidah masing masing agama itu berbeda. Jadi konsep *siyasah syar’iyyah* itu ya berpolitik dengan berlandaskan pada hukum Islam. Sedangkan hukum Islam itu ya yang bersumber dari *al-Qur’an, sunnah, qiyas, ijma* juga.”¹⁴⁰

Beliau juga menambahkan bahwasanya apa yang dibahas dalam *siyasah syar’iyyah* sendiri tidak lepas dari apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah.

“Ranah pembahasan *siyasah syar’iyyah*. Tadi kan dijelaskan kalau *siyasah syar’iyyah* itu kan politik berdasarkan ada syari’at Islam. Ngomong-ngomong soal syari’at itu tidak lepas dari apa yang dianjurkan dan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Itu di dalamnya termaktub ada *al-Qur’an* dan hadits. Konteks pembahasannya itu tergantung dari segi apa. Kalau misal dari segi politik, berarti ya mengambil nilai-nilai kepemimpinan,

¹⁴⁰ *Ibid.*

nilai-nilai seorang amir, nilai-nilai administrasi, nilai nilai yudabbiru (tentang pelayanan).”¹⁴¹

Berdasarkan penjelasan Bapak Ladin, dapat diketahui bahwa *siyasah syar’iyyah* adalah politik yang dilandaskan pada syariat Islam diantaranya dari *al-Quran, as-Sunnah, Qiyas*, maupun *Ijma’* para ulama. Syariat Islam sendiri mempunyai peran penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat termasuk bagi penyandang disabilitas sekalipun. Dalam Islam, terdapat *siyasah syar’iyyah* juga mengatur hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya.

“Secara internal *siyasah syar’iyyah* itu dapat dipahami dengan kekuatan umat Islam, baik itu potensinya mereka, maupun unsur lainnya yang mendatangkan kemajuan dari umat. Kalau secara eksternalnya itu tentang cara berinteraksi umat Islam dengan sesamanya. Contohnya saja secara eksternal itu kita juga disuruh untuk menunaikan sholat dan juga menunaikan zakat, disini berarti kita juga disuruh untuk menunaikan ibadah sosial. Ini kan juga merupakan ubudiyah kita kepada Allah, tapi itu saja belum cukup, kita juga perlu untuk hablum minannas. Nah setelah memahami itu, baru kita bisa mengendalikan, mengatur ataupun memelihara segala urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Q.S. an-Nissa ayat 58-59 dimaknai begini, para pemimpin harus berlaku adil dalam segala macam kebijakan, begitupun masyarakat juga harus taat kepada pemimpinnya.”¹⁴²

Beliau juga menambahkan:

“Jadi berkenaan dengan permasalahan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas itu *siyasah syar’iyyah* itu mengajurkan agar para pemimpin itu memenuhi setiap hak umatnya, yang dalam hal ini mereka penyandang disabilitas. Tanpa adaya diskriminasi. Orang mau beramal itu Nabi menganjurkan, beramallah kepada seseorang walaupun dia kafir. Terkait dengan pemberdayaan sosial ini, tentu kita sebagai umat muslim, beramal tidak pandang bulu, walaupun

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

tidak sepaham dengan kita, tapi niat kita adalah berbuat kebaikan. Semua itu posisinya sama. Bahkan baik itu mereka yang kondisi sempurna maupun yang memiliki keterbatasan seperti penyandang disabilitas, mereka juga sama-sama hamba Allah, sama-sama juga umat Rasulullah, jadi harus juga disamakan hak-haknya, agar mereka juga bisa mendapatkan martabat sesuai dengan martabatnya. Memposisikan manusia diposisi yang tepat (humanis).”¹⁴³

Beliau kembali menambahkan:

“Dengan memberdayakan penyandang disabilitas juga termasuk kebaikan yang sifatnya sosial. Sedangkan kita juga dianjurkan untuk beribadah sosial, dalam artian ibadah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Karena manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Bahkan ketika kita menjumpai manusia yang nasibnya kurang beruntung, nah itu juga menjadi tanggung jawab kita. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada 5: roduṭ ṭahiyat (menjawab salam), ijabatut da'wah (menghadiri undangan), 'iyadatul marid (menjenguk orang sakit). Kan pas sekali kan, penyandang disabilitas ini kan kebanyakan mereka itu orang-orang yang lemah, nah itu ketika kita menjenguk mereka, itu juga merupakan bagian dari amaliah amaliah yang terpuji. Yang terakhir itu mendoakan orang bersin. Nah itu tandanya Islam itu kan peduli kepada saudara, lebih-lebih kepada para penyandang disabilitas, ya seharusnya diutamakan. Kan tujuannya sendiri adalah demi kemaslahatan umat. Kalau didiskriminasi kan berarti kemaslahatan untuk penyandang disabilitas tidak terwujud.”¹⁴⁴

Para penyandang disabilitas sendiri tidak lepas dari stigma masyarakat kepada mereka. Hal inilah yang menyebabkan mereka sulit untuk berkembang. Berkaitan dengan ini, Bapak Ladin menuturkan bahwa adanya upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk memberdayakan mereka dengan beragam program-program itu penting guna mewujudkan kemaslahatan mereka.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

“Keberadaan masyarakat, pemahaman mereka itu kadang berbeda. Ada yang memahami sesuatu itu dengan menunjukkan belas kasih, ada juga yang memandang orang disabilitas itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Namun demikian, kita tidak bisa serta merta menjustifikasi masyarakat itu juga tidak bisa. Tapi kaitannya dengan kemaslahatan, program-program yang mungkin diarahkan kepada disabilitas, itu harus diprioritaskan bagi mereka. Hal ini karena orang yang sempurna, itu aja kadang ngurusi dirinya sendiri kesulitan, apalagi bagi seorang yang hidup dengan keterbatasan. Jadi kalau ada program-program itu dibanding dengan anggapan-anggapan masyarakat itu, kalau dari segi maslahahnya ya saya bisa bilang banyak maslahahnya, akan tetapi perlu untuk ditingkatkan terus supaya anggapan-anggapan masyarakat yang demikian itu lambat laun berubah.”¹⁴⁵

Islam sendiri sangat peduli terhadap umatnya, terlebih lagi bagi mereka dengan keterbatasan seperti para penyandang disabilitas. Pemenuhan hak pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas pun juga dijelaskan didalam *al-Qur'an* walaupun tidak secara eksplisit, begitu pun dalam cabang keilmuan Islam lainnya seperti *siyasah syar'iyah*. Hal inilah yang membuktikan bahwa pentingnya untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama, walaupun itu dengan penyandang disabilitas sekalipun.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni sebagai berikut:

¹⁴⁵ *Ibid.*

1. Akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung dapat membuat para penyandang disabilitas terhindar dari stigma negatif yang masih melekat kepada mereka. Hal tersebut dilakukan dengan cara berpartisipasi aktifnya para penyandang disabilitas dalam organisasi khusus bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, para penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung juga mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung guna meningkatkan potensi yang mereka miliki. Selain untuk meningkatkan keterampilan, pelatihan keterampilan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Dengan demikian, para penyandang disabilitas dapat bebas dari stigma masyarakat.
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas melalui beberapa cara yakni:
 - a. Peningkatan kemauan dan kemampuan para penyandang disabilitas;
 - b. Penggalan potensi para penyandang disabilitas;
 - c. Pemberian akses pemberdayaan di berbagai bidang; dan
 - d. Pemberian bantuan usaha
3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang sesuai dengan konsep *siyasa*

syar'iiyyah. Hal tersebut dikarenakan tindakan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mendatangkan kemaslahatan umat. Namun demikian, perlu ditingkatkan kembali agar kemaslahatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak orang.